

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadjon, Philipus M, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, Arifuddin Muda, 2020 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Moleong, Lexy J, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas. Jakarta.
- Ridwan, H.R, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, L. Bernard, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
160)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747)

C. Artikel Jurnal

Chandranegara, Ibnu Sina, 2012, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-
Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional." *Jurnal
Konstitusi* 9, no. 1: 27-48.

Disurya, Ramanata, Layang Sardana Suryati, and L. Sardana, 2021,
"Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-
Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum* 19.

Jaya, Alwi, dan Elvi Susanti, 2022, "Kepatuhan pejabat tata usaha negara
terhadap keputusan badan peradilan tata usaha negara." *Indonesian
Journal of Criminal Law* 4, no. 1: 80-93.

Marbun, Syahrudin Fahmi, 2011, "Peradilan administrasi negara dan upaya
administratif di Indonesia", *FH UII Press*.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Saluchu, 2017, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6.

Paath, Zenia Rut Nelani, 2023, ”Implementasi Penerapan Sistem Pengupahan Minimum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Sulawesi Utara.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4: 5902-5915.

Putra, Hidayat Pratama, 2020, “Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1.

Rahim, Abdur, et al, 2023, “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.8 (2023): 5806-5811.

Riswandi, Agus Budi Riswandi, 2007, ”Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1).

Riyanto, Sigit, et al, 2020, ”Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020).” *Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

Tjandra, Willy Riawan, 2011, ”Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 75-88.

D. Internet

CNBC Indonesia, “Ini Kronologi Anies Nekat Revisi UMP, Naik Jadi 4,6 Juta”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211227161146-4-302418/ini-kronologi-anies-nekat-revisi-ump-naik-jadi-rp-46-juta>, diakses 16 September 2023.

CNN Indonesia, “Alasan Buruh Tolak Rumus Baru Upah dan Pesangon” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223114316-92-609730/alasan-buruh-tolak-rumus-baru-upah-dan-pesangon-jokowi>, diakses 15 September 2023.

Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum->

menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all#, diakses 19 Oktober 2023.

Kompas.com, “Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya.”
<https://kmp.im/app6https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/20/15173781/gugat-anies-ke-ptun-apindo-bukan-soal-besaran-kenaikan-ump-tetapi?page=all>, diakses 16 September 2023.

Tempo.co, “Hari Ini Ribuan Buruh Demo Tolak Kenaikan UMP: Marah, di Atas Ubun-ubun” https://bisnis.tempo.co/read/1532310/hari-ini-ribuan-buruh-demo-tolak-kenaikan-ump-marah-di-atas-ubun-ubun?page_num=1, diakses 15 September 2023.

E. Karya Ilmiah

Mayal, Gos. 2019, Analisis Yuridis Terhadap Upah Minimum Buruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Segarawisesa, Julungpujud, 2023, Kesepakatan Sebagai Dasar Penetapan Upah Terendah Bagi Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, *Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudawan, Moh Yuda, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Atas Pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.